

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan suatu aset yang berharga bagi suatu organisasi. Sumber daya manusia (Sutrisno, 2014: 3) merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akan perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya rasio, rasa, dan karsa. Sedangkan Sumber Daya Manusia (Wirawan, 2015: 18) adalah orang yang disebut sebagai manajer, pegawai, karyawan, buruh atau tenaga kerja yang bekerja untuk organisasi. Sumber daya manusia dalam suatu organisasi dituntut untuk memiliki kemampuan dan menghadapi segala tantangan yang didapatkan selama kegiatan-kegiatan dalam pekerjaannya, sehingga dapat menunjukkan kinerja yang dimilikinya. Semua tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tidak dapat tercapai apabila tidak ada unsur manusia sebagai penggerak jalannya organisasi.

Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia saja, tetapi juga kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Kompetensi (Sukmaningrum, 2012) adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi (Hutapea dan Thoha, 2008: 7) adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Jadi dapat disimpulkan kompetensi berarti suatu kemampuan berupa pengetahuan dan keahlian untuk melaksanakan suatu pekerjaan hingga terselesainya tugas.

Kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas pula. Hutapea dan Thoha (2008: 8), mengungkapkan ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemampuan, dan perilaku individu.

1. Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu). Pengetahuan karyawan turut

menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan. Pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan yang meliputi :

- a. Mengetahui dan memahami pengetahuan di bidangnya masing-masing yang menyangkut tugas dan tanggung jawab dalam bekerja.
  - b. Mengetahui tupoksi organisasi instansi.
  - c. Mengetahui bagaimana menggunakan informasi, peralatan dan teknik yang tepat dan benar.
2. Keterampilan (*skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal. Keterampilan (*Skill*), meliputi :
- a. Kemampuan menyelesaikan tugas dengan baik.
  - b. Kemampuan dalam mengatasi masalah.
  - c. Kemampuan menentukan prioritas masalah.
  - d. Kemampuan memberikan informasi pelayanan.
3. Sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah laku seorang karyawan/pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila karyawan mempunyai sifat yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sikap kerja, meliputi :
- a. Mempunyai kreativitas dalam bekerja.
  - b. Adanya semangat kerja yang tinggi.
  - c. Mempunyai kemampuan dalam perencanaan/pengorganisasian.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka organisasi pemerintahan harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi, misalnya sumber daya manusia nya harus berlatar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan. Sehingga, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi akurat, efektif, dan efisien karena dikelola oleh SDM yang berlatar belakang pendidikan Akuntansi (Rahayu, 2014: 3).

### **2.1.2. Sistem Pengendalian Intern**

Sistem Pengendalian Internal (Arens, 2014) terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarnya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, menjelaskan tentang beberapa poin penting antara lain :

1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
3. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur :
  - a. Lingkungan pengendalian;
  - b. Penilaian risiko;
  - c. Kegiatan pengendalian;
  - d. Informasi dan komunikasi;
  - e. Pemantauan pengendalian intern.
5. Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud terdiri atas:
  - a. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
  - b. Pembinaan sumber daya manusia;
  - c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.

Sistem Pengendalian Intern berperan untuk mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan serta bertujuan untuk mengawasi dan mengarahkan sumber daya suatu organisasi serta melihat keandalan data akuntansi. Lingkungan pengendalian internal juga dapat membantu pengurus dan pengelola keuangan dalam menjaga asset, menjamin tersajinya pelaporan keuangan, manajerial yang akurat dan dapat diandalkan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efektif dan efisien (Faishol, 2016: 207).

### **2.1.3. Standar Akuntansi Pemerintahan**

#### **2.1.3.1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013, SAP berbasis akrual adalah

SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran.

Bastian (2010: 137) mengemukakan standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah sebagai berikut:

Persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan yaitu prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

#### **2.1.3.2. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Menurut SAP**

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 yaitu:

##### **1. Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-laporan operasional (LO), beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka laporan realisasi anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah.

2. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban pada masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal yang tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
3. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat laporan realisasi anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.
6. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
7. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

#### 8. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Jika dalam melakukan kegiatan akuntansi serta dalam menyusun laporan keuangan menerapkan prinsip-prinsip tersebut yang sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010, maka laporan keuangan tersebut bisa dimengerti dan dipahami oleh berbagai pihak. Dengan demikian, untuk menunjang laporan keuangan yang baik maka prinsip-prinsip tersebut perlu dipahami dan diterapkan.

#### **2.1.3.3. Kebijakan Akuntansi Pemerintahan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dapat dilakukan melalui tahapan penyusunan kebijakan akuntansi terkait laporan keuangan dimulai dari pengumpulan rujukan atau referensi berupa peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan kebijakan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai rujukan utama adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya:

- a. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
- b. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
- c. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas
- d. PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
- e. PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan
- f. PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi
- g. PSAP 07 tentang Aset Tetap
- h. PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
- i. PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban
- j. PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan
- k. PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi
- l. PSAP 12 tentang Laporan Operasional

Lampiran I PP No. 71 tahun 2010 memuat mengenai semua hal yang berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah, terutama mengenai aturan serta standar format laporan keuangan pemerintah.

#### **2.1.4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

##### **2.1.4.1. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah**

Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan tindakan pragmatis, oleh karena itu laporan keuangan pemerintah harus dievaluasi dalam hal manfaat laporan tersebut terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan serta mudah tidaknya laporan keuangan tersebut dipahami oleh pemakai (Mardiasmo, 2009: 163). Laporan keuangan pemerintah daerah adalah bagian dari proses pelaporan keuangan di mana pemerintah daerah disusun untuk menyajikan posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh badan pemerintah daerah (Suwanda, 2015: 143).

Laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang telah ditetapkan agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan. Laporan keuangan pemerintah harus disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Informasi dalam laporan keuangan sangat diperlukan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berbagai pihak, sehingga bermanfaat atau dengan kata lain, informasi tersebut harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005). Pihak-pihak tersebut memiliki kepentingan dalam menggunakan laporan keuangan tersebut, misalnya untuk pengambilan suatu keputusan. Keputusan yang dihasilkan diharapkan dapat membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik (Wati, Herawati, dan Sinarwati, 2014).

#### **2.1.4.2. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah**

Tujuan dari pembuatan laporan yaitu memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010, tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan laporan keuangan pemerintah menurut Mardiasmo (2009) secara umum adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan pengelolaan;
2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif;
3. Perencanaan dan informasi otorisasi;
4. Kelangsungan organisasi;
5. Hubungan masyarakat;
6. Sumber data dan gambaran.

Secara rinci dan spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah terdapat dalam PP No. 71 tahun 2010 yaitu untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Menurut Mardiasmo (2009: 163), secara rinci tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.

2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang di syaratkan.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembuatan laporan keuangan pemerintahan yaitu untuk memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi pemerintahan yang digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Selain itu tujuan dari pembuatan laporan keuangan pemerintahan juga sebagai pertanggungjawaban pemerintah atas apa yang telah dikerjakan selama satu periode.

#### **2.1.4.3. Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah**

Kinerja dan akuntabilitas suatu daerah dapat diketahui berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan pada daerah tersebut. Apabila suatu daerah memiliki laporan keuangan yang baik, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut memiliki kinerja dan akuntabilitas yang baik pula. Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat dilihat berdasarkan karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP No. 71 tahun 2010). Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

##### **1. Relevan**

Laporan Keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan:

- a. Memiliki manfaat umpan balik  
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif  
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu  
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

- d. Lengkap  
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- 2. Andal  
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
  - a. Penyajian jujur  
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
  - b. Dapat diverifikasi  
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
  - c. Netralitas  
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- 3. Dapat dibandingkan  
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
- 4. Dapat dipahami  
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Jika laporan keuangan pemerintah memenuhi keempat karakteristik laporan keuangan sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010, maka laporan keuangan tersebut dapat dikatakan baik dan berkualitas. Dengan laporan keuangan yang berkualitas, dapat dikatakan bahwa kinerja dan akuntabilitas pemerintah juga baik.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang uraikan dalam Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Emilda Ihsanti (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota)	X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Y : Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Kompetensi SDM mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kab. Lima Puluh Kota. Tetapi, Penerapan SAKD tidak mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kab. Lima Puluh Kota. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan pegawai di bidang keuangan dalam menyusun laporan keuangan belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
2.	Kadek Desiana Wati,	Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan	X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kompetensi Sumber Daya Manusia,

	Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati (2014)	SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	X2 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan X3 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Y : Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
3.	Noprial Valenra Maksyur (2015)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	X1 : Kualitas Sumber Daya Manusia X2 : Komitmen Organisasi X3 : Sistem Pengendalian Intern X4 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Y : Kualitas Laporan Keuangan	Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
4.	Lia Hanifa, Andi Basru Wawo, dan Husin (2016)	Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Laporan Keuangan	X1 : Kompetensi Pengelola Keuangan X2 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Y : Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara baik secara parsial maupun simultan.

5.	Freddie Lasmara dan Sri Rahayu (2016)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci	X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 : Perangkat Pendukung X3 : Peran Auditor Internal Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung, Peran Auditor Internal secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan nilai koefisien determinasi 60.6% maka hal ini menandakan bahwa pengaruh kompetensi sumber daya manusia, perangkat pendukung, peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah cukup erat.
6.	Putriasri Pujanira (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	X1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan X3 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Y : Kualitas	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap

		Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY	Laporan Keuangan Daerah	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY.
7.	Ratna Wijayanti (2017)	Pengaruh Kompetensi SDM dan Implementasi Akuntansi AkruaI Terhadap Laporan Keuangan Daerah	X1 : Kompetensi SDM X2 : Implementasi Akuntansi AkruaI Y : Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Madiun. Sedangkan Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Madiun.
8.	Tut Madiguna Agung dan Gayatri (2018)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	X1 : Gaya Kepemimpinan X2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X3 : Sistem Pengendalian Intern X4 : Komitmen Organisasi X5 : Pemanfaatan Teknologi Informasi	Gaya Kepemimpinan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap

			Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
9.	Anissa Putri Prabangsari (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Badan dan Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri)	X1 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah X2 : Sistem Pengendalian Interen X3 : Kompetensi Sumber Daya Manusia Y : Kualitas Laporan Keuangan	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Sedangkan, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI memediasi variabel Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
10.	Mayang Wulandari (2018)	Pengaruh Penerapan Standar	X1 : Penerapan Standar Akuntansi	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

		<p>Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan)</p>	<p>Pemerintah X2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia X3 : Komitmen Organisasi Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan. Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Solok Selatan. Interaksi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang dimoderasi oleh Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Interaksi Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimoderasi oleh Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				Kabupaten Solok Selatan.
--	--	--	--	--------------------------

Sumber : Data yang diolah, 2019

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir diatas dimana pada penelitian ini kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintah sebagai variabel independen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dengan seluruh OPD di Kabupaten Pali yang menjadi objek pada penelitian ini.

### **2.3. Kerangka Pemikiran**

Sumber Daya Manusia (Wirawan, 2015: 18) adalah orang yang disebut sebagai manajer, pegawai, karyawan, buruh atau tenaga kerja yang bekerja untuk organisasi. Sumber daya manusia merupakan penggerak dari jalannya organisasi. Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia saja, tetapi juga kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Kompetensi (Sukmaningrum, 2012) adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas memiliki tiga komponen utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, diperlukan suatu sistem yang digunakan untuk mencegah adanya kecurangan. Sistem tersebut yaitu Sistem Pengendalian Intern. Sistem Pengendalian Intern berperan untuk mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan serta bertujuan untuk mengawasi dan mengarahkan sumber daya suatu organisasi serta melihat keandalan data akuntansi. Dengan sistem pengendalian intern akuntansi yang baik, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan. Dengan ditetapkannya pengendalian internal dalam sistem akuntansi,

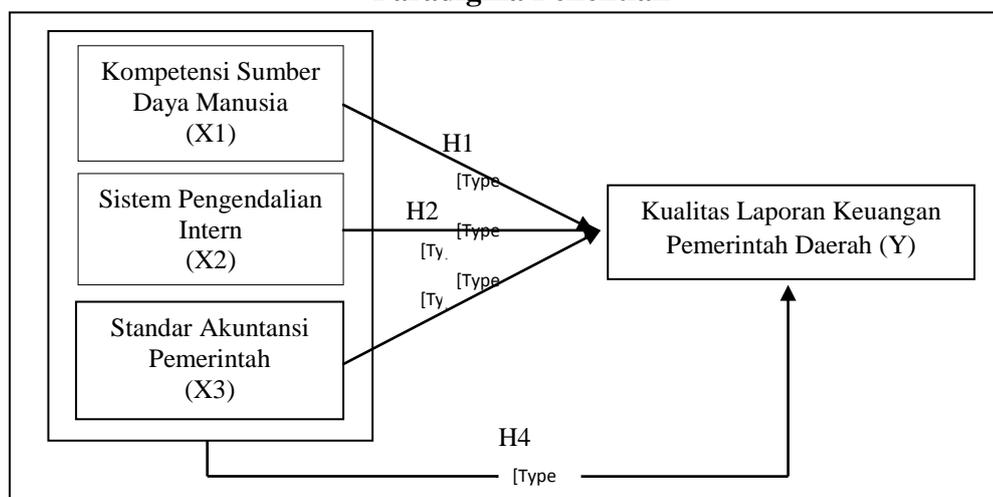
maka sistem akuntansi akan menghasilkan informasi akuntansi yang lebih berkualitas (tepat waktu, relevan, akurat, dan lengkap), dan dapat diaudit (Maksyur, 2015).

Dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah maka harus disusun berdasarkan standar yang berlaku. Standar akuntansi perlu diterapkan agar pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dapat disajikan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010. Instansi pemerintah mulai tahun 2015 harus menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu berbasis akrual (Wulandari, 2018).

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu tolok ukur dari baiknya tata kelola pemerintahan daerah tersebut. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Suatu laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan tersebut sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuanfan dalam PP Nomor 71 tahun 2010.

Berdasarkan uraian diatas akan tampak pada Gambar 2.1 Paradigma Penelitian berikut:

**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**



Sumber : Data yang diolah, 2019

[Type

[Type

## **2.4. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

### **2.4.1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali**

Laporan keuangan daerah merupakan salah satu tolok ukur dari baiknya tata kelola pemerintahan daerah tersebut. Kualitas laporan keuangan dapat ditentukan dari sumber daya manusia yang ada dalam organisasi pemerintahan. Sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pula. Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia saja, tetapi juga kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Menurut Pujanira (2017), kompetensi sumber daya manusia penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun dapat tepat waktu. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Maksyur, 2015). Salah satu faktor dari penentu kualitas sumber daya manusia bagi organisasi pemerintah yaitu memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan. Hal itu dikarenakan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan telah memiliki pengetahuan yang cukup dan memadai mengenai akuntansi dan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian Lasmara dan Rahayu (2016) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, perangkat pendukung dan peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Kerinci yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya apabila kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan pada seluruh SKPD di Kabupaten Kerinci dilaksanakan dengan baik maka akan menunjang pencapaian

kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut dan hasil penelitian terdahulu maka penulis mengajukan hipotesis:

**H1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali.**

#### **2.4.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali**

Dalam penyusunan laporan keuangan diperlukan suatu sistem yang digunakan untuk mencegah adanya kecurangan. Sistem Pengendalian Intern yang memiliki tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern berperan untuk mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan serta bertujuan untuk mengawasi dan mengarahkan sumber daya suatu organisasi serta melihat keandalan data akuntansi. Dengan sistem pengendalian intern akuntansi yang baik, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan (Maksyur, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian Agung dan Gayatri (2018) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, perangkat pendukung dan peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Kerinci yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, semakin baiknya sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh SKPD Kabupaten Karangasem, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karangasem juga akan semakin meningkat. Berdasarkan uraian tersebut dan hasil penelitian terdahulu maka penulis mengajukan hipotesis:

**H2 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali.**

### **2.4.3. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali**

Dalam menyusun laporan keuangan, diharapkan berpedoman dan sesuai dengan standar yang berlaku dan telah ditetapkan. Standar dan sistem akuntansi perlu diterapkan secara konsisten agar pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dapat disajikan secara lengkap dan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, standar akuntansi pemerintahan diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Menurut Wati, Herawati, dan Sinarwati (2014), standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan.

Berdasarkan hasil penelitian Pujanira (2017) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DIY yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah DIY. Artinya, semakin baik Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan maka semakin baik kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut dan hasil penelitian terdahulu maka penulis mengajukan hipotesis :

**H3 : Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali.**

### **2.4.4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali**

Pemerintah di setiap daerah berlomba-lomba agar terwujudnya pemerintahan dengan tata kelola yang baik. Pemerintahan dengan tata kelola yang baik dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan daerah tersebut setiap tahunnya.

Menurut Wati, Herawati, dan Sinarwati (2014) sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya tetapi juga kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, juga diperlukan suatu sistem pengendalian yang digunakan untuk mendeteksi dan mencegah adanya kecurangan. Menurut Maksyur (2015) dengan ditetapkannya pengendalian internal dalam sistem akuntansi, maka sistem akuntansi akan menghasilkan informasi akuntansi yang lebih berkualitas (tepat waktu, relevan, akurat, dan lengkap), dan dapat diaudit (auditabel). Agar laporan keuangan dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara lengkap dan tepat waktu, maka diperlukan suatu standar. Standar akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan).

Berdasarkan hasil penelitian Pujanira (2017) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DIY yang menyatakan bahwa penerapan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah DIY. Dan juga berdasarkan hasil penelitian Wati, Herawati, dan Sinarwati (2014) tentang pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAP, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut dan hasil penelitian terdahulu maka penulis mengajukan hipotesis :

**H4 : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara simultan terhadap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali.**